



ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2019 - 2021

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Fachenda Itsnain Naufal Zuhdi

NPM. 21901082128



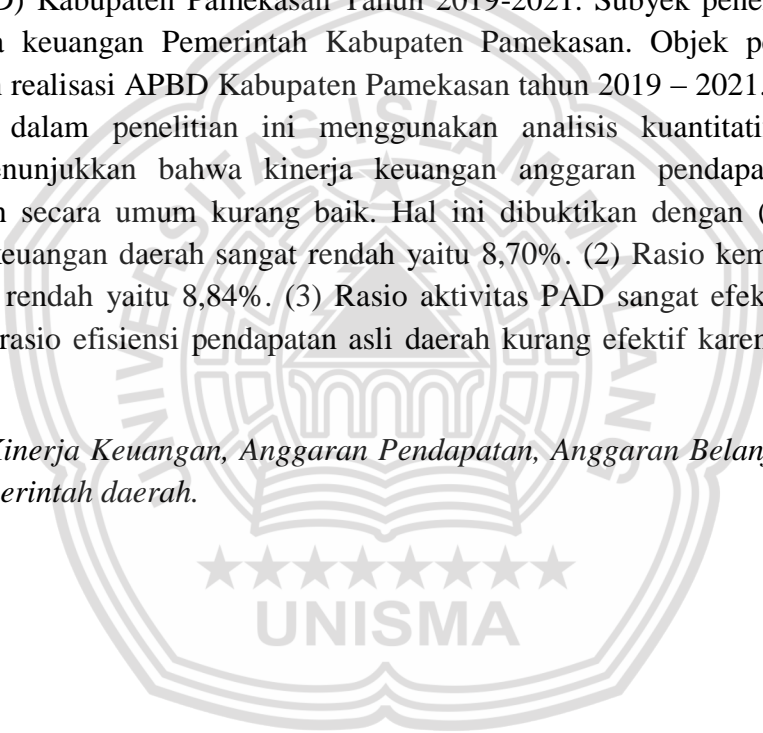
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

2023

ABSTRAK

Kinerja keuangan merupakan gambaran hasil ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu perusahaan pada waktu tertentu melalui aktivitas perusahaan tersebut. Informasi yang disajikan dengan baik dalam suatu laporan keuangan akan sangat berguna bagi perusahaan dalam mengambil keputusan dan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Untuk menggali lebih dalam informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, diperlukan analisis laporan keuangan. Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2021. Subyek penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Objek penelitian adalah laporan realisasi APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2019 – 2021. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara umum kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan (1) rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah yaitu 8,70%. (2) Rasio kemampuan daerah sangat rendah yaitu 8,84%. (3) Rasio aktivitas PAD sangat efektif yaitu 113,78%. (4) rasio efisiensi pendapatan asli daerah kurang efektif karena hanya 30,21%.

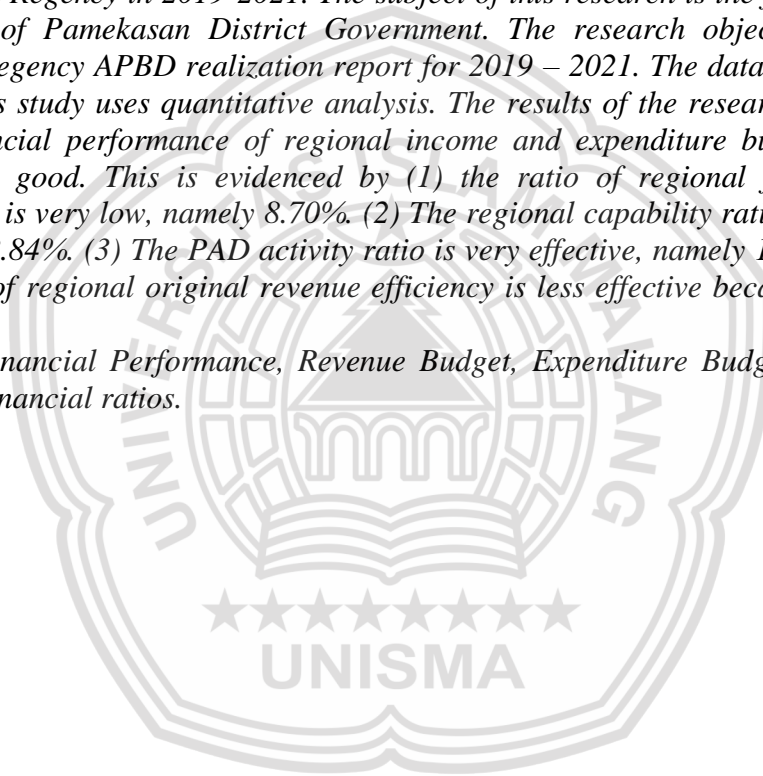
Kata Kunci: *Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, rasio keuangan pemerintah daerah.*



ABSTRACT

Financial performance is a description of the economic results that can be achieved by a company at a certain time through the company's activities. Information that is properly presented in a financial report will be very useful for companies in making decisions and to find out the company's financial performance. To explore more information contained in the financial statements, an analysis of financial statements is needed. Measurement of Financial Performance is very important to assess the accountability of local governments in managing regional finances. The purpose of this study is to analyze the Financial Performance of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Pamekasan Regency in 2019-2021. The subject of this research is the financial performance of Pamekasan District Government. The research object is the Pamekasan Regency APBD realization report for 2019 – 2021. The data analysis method in this study uses quantitative analysis. The results of the research show that the financial performance of regional income and expenditure budgets is generally not good. This is evidenced by (1) the ratio of regional financial independence is very low, namely 8.70%. (2) The regional capability ratio is very low, namely 8.84%. (3) The PAD activity ratio is very effective, namely 113.78%. (4) the ratio of regional original revenue efficiency is less effective because it is only 30.21%.

Keywords: Financial Performance, Revenue Budget, Expenditure Budget, local government financial ratios.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan merupakan gambaran hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada waktu tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan. Aktivitas-aktivitas ini dicatat dan dirangkum menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai media untuk melaporkan keadaan dan posisi perusahaan pada pihak yang berkepentingan, terutama pada pihak kreditur, investor, dan manajemen perusahaan itu sendiri (Ajeng, 2018).

Pandemi Covid-19 sangat besar dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak kepada kondisi ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial rakyat Indonesia. Menurunnya berbagai aktivitas ini mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Pemerintah merespon dampak Covid-19 ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Ditinjau secara keseluruhan, Peraturan tersebut mengatur Kebijakan Keuangan Negara dan kebijakan stabilitas sistem Keuangan Negara. Kebijakan keuangan negara tersebut meliputi kebijakan di bidang perpajakan, Kebijakan Belanja Negara termasuk kebijakan di Bidang Keuangan Daerah, dan kebijakan pembiayaan.

Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi daerah secara maksimal, sedangkan di masa Covid-19 ini

berdasarkan Surat Edaran tentang *Refocusing* dan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dengan percepatan penanganan Covid-19 masing masing daerah dengan secara maksimal agar dapat mengurangi serta mempercepat penanganan pandemi yang sedang dihadapi oleh Negara Indonesia serta dapat membantu perekonomian rakyat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak terjadi krisis ekonomi di setiap daerah (Putri, 2022).

Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 ke tahun 2020 menurun sebanyak Rp. 28.978.635.142, sedangkan pada tahun 2020 ke tahun 2021 menurun sebanyak Rp. 31.404.754.798. Belanja dan pembiayaan daerah juga mengalami penurunan/kenaikan seperti pendapatan daerah. Hal ini menandakan Covid-19 membawa dampak pada besaran anggaran APBD yang terjadi di Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola anggaran tersebut agar dapat terealisasi dengan baik terutama untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Pamekasan.

Informasi yang disajikan dengan benar dalam suatu laporan keuangan, akan sangat berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Untuk menggali lebih banyak lagi informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, diperlukan suatu analisis laporan keuangan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang disebut rasio. Analisis rasio keuangan adalah proses penentuan

operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan (Riyanto (1992: 329) dalam Liora (2014). Analisis laporan keuangan memprediksikan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang, sehingga disinilah laporan keuangan tersebut begitu diperlukan (Ajeng, 2018).

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis (Assidi, 2008).

Selama ini penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan pertimbangan *incremental budget* maka seringkali mengabaikan Kinerja Keuangan dalam APBD. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap pelaporan realisasi anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran sehingga kemungkinan anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya. Penggunaan analisis Kinerja Keuangan sebagai alat keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Maka itu perlu suatu perubahan yang

mengacu pada penggunaan analisis Kinerja Keuangan dalam pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (Nordiawan, 2010).

Pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. APBD merupakan kebijakan yang utama bagi Pemerintah daerah. Sebagai kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. APBD sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam keuangan daerah, prosesnya tidak terlepas dari tema desentralisasi ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting dan perlu

mendapat perhatian yang lebih agar sumber daya keuangan dikelola sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan tersebut, dapat dilakukan dengan beberapa alat ukur berupa rasio diantaranya; rasio kemandirian, rasio kemampuan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD. Dalam hal ini pengukuran tersebut guna mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah telah mampu melaksanakan rumah tangga pemerintahan sepenuhnya atau tidak.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.

Rasio kemampuan keuangan daerah merupakan rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yang diukur dengan rasio antara pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah.

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio Efisiensi menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin rendah rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapai. Salah satu bentuknya adalah kinerja anggaran. Anggaran merupakan komponen penting yang menjadi perhatian publik karena memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan, dan pengendalian organisasi, serta penilaian kinerja. Penilaian kinerja APBD sangat penting dalam kerangka menuju penguatan otonomi daerah dengan new game dan new rulanya (Sulistyo, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (APBD) KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 – 2021.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Rasio Kemandirian terhadap kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sampai tahun 2021?
2. Bagaimana Rasio Kemampuan terhadap kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sampai tahun 2021?
3. Bagaimana Rasio Efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sampai tahun 2021?
4. Bagaimana Rasio Efisiensi PAD terhadap kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sampai tahun 2021?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Rasio Kemandirian terhadap kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sampai tahun 2021.

2. Untuk mengetahui Rasio Kemampuan terhadap kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sampai tahun 2021.
3. Untuk mengetahui Efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sampai tahun 2021.
4. Untuk mengetahui Efisiensi PAD terhadap kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2019 sampai tahun 2021.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Bagi praktisi

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai ide pemikiran dan menambah wawasan dalam penelitian yang akan dirancang mengenai kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian bisa dijadikan bahan untuk dikembangkan bahkan diteliti lebih lanjut terkait kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dapat diimplementasikan untuk tahun berikutnya.

c. Bagi pihak lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sumber referensi bacaan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan tema sejenis.

d. Bagi Institusi

Hasil penelitian dapat digunakan untuk referensi para pembaca utamanya para mahasiswa maupun dosen.



BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, yang merupakan wujud desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang didalamnya merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Kabupaten Pamekasan merupakan kota yang mengurus otonomi daerah sendiri. Dimana dalam hal ini untuk mengukur kinerja pemerintahan dilakukan dengan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Analisis rasio keuangan daerah tersebut diantaranya: rasio kemandirian, rasio kemampuan keuangan daerah rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD.

1. Rasio Kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan sendiri. Dalam hal ini Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sampai tahun 2021 sebesar 8,70% termasuk dalam kategori kemampuan yang rendah sekali dengan pola tata hubungan instruktif, yang artinya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan lebih banyak mendapatkan pengarahan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini peran pemerintah pusat dan provinsi masih mendominasi untuk membangun Kabupaten Pamekasan.
2. Rasio Kemampuan Daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah dalam membiaya pembangunan. Dalam hal ini Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 –

2021 sebesar 8,48%. Atas hal tersebut dapat dikategorikan pada tahun 2019 dikategorikan rendah, 2020 sangat rendah, sedangkan tahun 2021 dikategorikan rendah. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah rendah sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi juga rendah.

3. Rasio Efektifitas PAD merupakan gambaran pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dalam hal ini Kabupaten Pamekasan atas hasil analisis rata-rata rasio efektifitas PAD Kabupaten Pamekasan sebesar 113,78% dengan kategori sangat efektif. Maka dalam hal ini keseluruhan pendapatan daerah telah berhasil mencapai target yang direncanakan.
4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini Kabupaten Pamekasan dilihat dari pengeluaran belanja daerahnya. Kinerja keuangan tahun 2019-2021 dikatakan kurang efisien dengan persentase rata-rata 30,21%. Hal ini tergolong tidak efisien. Penurunan persentase tersebut disebabkan karena bertambahnya belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, hanya empat faktor yang dijadikan variabel independen yang memengaruhi kinerja keuangan, yakni rasio

kemandirian, rasio kemampuan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD.

2. Analisis data dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif, yang dimana tanpa adanya uji-uji yang di gunakan, sehingga langsung menggunakan perhitungan rasio.
3. Penelitian ini hanya menghitung tiga tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan.

5.2 Saran

1. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah menambahkan variabel-variabel lain seperti rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio belanja operasional, rasio belanja modal, untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih lengkap.
2. Untuk memperoleh data yang lebih akurat, disarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan analisis kualitatif dengan metode survei dengan penambahan teknik wawancara secara langsung.
3. Peneliti selanjutnya perlu menambahkan dengan tahun anggaran yang terbaru dengan menggunakan laporan realisasi anggaran yang telah diaudit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, Hony. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Blora (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ajeng, (2018). *Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2014 - 2016*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Assidi, B. (2008). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun. c*, 1–11.
- Barrimi, M., Hafidi, H., Baybay, H., Rammouz, I., & McKenzie, R. B. (2013). Analisis Laporan Keuangan. *Encephale*, 53(1), 21.
- Fahmi, I. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Keempat)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>.
- Kabupaten Pamekasan. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021*. Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- Kabupaten Pamekasan. (2020). *Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22A 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019*. Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- Kabupaten Pamekasan (2023). *Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*.

- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.
- Mahmudi, M. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. *Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta*.
- Mandua, Tety Lensiana, Camelia L. Numberi, and Simson Werimon. "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Periode 2017-2021." *Lensa Ekonomi* 16.02 (2023): 237-253.
- Mariasari, V., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Periode 2018-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuru Buana*, 7(2).
- Munawir, (2010), *Analisis Laporan Keuangan, edisi keempat*, cetakan ketiga belas, Yogyakarta : Liberty.
- Mandua. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Periode 2017-2021*.
- Munawir, S. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. (Edisi 4). Yogyakarta: Liberty.
- Nordiawan Deddi, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Putri, S. G. (2022). *Implementasi Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Pada Masa Pandemi covid-19*. <http://eprints.ipdn.ac.id/7940/>
- Saputra, R. W. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Ditinjau dari Rasio Keuangan (Studi Kasus di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013-2015)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Septyaningrum. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Tuban Tahun 2011 – 2016)*. Universitas Islam Malang.
- Supina Sino, Titin Ruliana, Imam Nazarudin Latif. (2016). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Secretariat Kabupaten Kutai Barat*. 1-7
- Surastowo, S. (2019). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Simplex*, 2(3).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 147.

- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43–59.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang pemerintahan daerah (2003) “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003*,” hal. 1–40.
- Williianti. (2020). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1, 12(2004)*, 6–25.
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015), hal.160.
- Yasrie, A. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014-2016. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(2), 67–8.

